



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TERHADAP PREMAN
PALAK, GELANDANGGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS
SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

AMANDA REGINA PUTRI

NIM. 11720725079

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ”** yang ditulis oleh :

Nama : Amanda Regina Putri

Nim : 11720725079

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 April 2021

Pembimbing Skripsi

PERI PIRMANSYAH, SH., MH.
NIK. 130217120

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENANGGULANG PREMAN PALAK, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM” yang ditulis oleh :

Nama : **AMANDA REGINA PUTRI**
NIM : 11720725079
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada

Hari/Tanggal : Kamis 09 Juni 2021
Waktu : 08.00 Wib
Tempat : Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Alpi Syahrin, SH.,MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Amanda Regina Putri (2021): “Efektivitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”

Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis ini sangat perlu diterapkan dikarenakan sudah ada Perda yang mengatur nya yaitu Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016. Menurut Pasal 38 butir 1 menyatakan bahwa setiap orang/badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri atau bersama- sama disepanjang jalan dan diseluruh tempat umum kecuali mendapat izin dari pihak yang berwenang. Namun dikecamatan Mandau belum tersosialisasi dengan baik, dikarenakan masih banyak Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis. Oleh karna itu Peneliti melakukan Kajian dalam Bentuk Karya ilmiah.

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengungkap “Efektivitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan apa saja kendala serta Faktor Penghambat dalam mengatasi Penanggulangan terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis Dikecamatan Mandau ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Kepala Tugas Satpol PP Kecamatan Mandau, Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis. Penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan terkait efektivitas penanggulangan Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis, Sedangkan Pengumpulan Data yang dilakukan adalah Melalui Angket, Observasi Partisipasi, Wawancara, Dokumentasi Dan Pustaka.

Berdasarkan hasil dari Penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu Dinas Sosial Dan Satpol PP Kecamatan Mandau sudah mengsosialisasikan dengan baik Peraturan daerah tersebut akan tetapi belum diterapkan secara efektif. Pemerintah kecamatan mandau telah melakukan beberapa upaya, salah satunya yaitu memulangkan Preman palak, gelandangan dan pengemis kekampung halamannya masing-masing. Namun ada beberapa kendala serta faktor penghambat Pemerintah Daerah Kecamatan Mandau dalam menanggulangnya yaitu masalah ekonomi yang semakin tinggi, sulitnya lapangan pekerjaan, terbatasnya ilmu pengetahuan dan juga dikecamatan Mandau belum memiliki Rumah khusus untuk Binaan dan Pengawasan bagi Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis ini menyebabkan Para Preman, Gelandangan dan pengemis semakin bertambah banyak jumlahnya karna tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanggulangan, Ketertiban Umum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Yon Hendri dan Ibunda Hilma Midesia serta adik Anggara Ridho Putra yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Akbar SHI, SH, MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum A dan HTN B, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
9. Kepada kawan-kawan kost Nelkha Putri yang selalu mengajarkan arti kehidupan dan susah senang bersama.
10. Kepada teman dekat, teman makan, teman begadang, teman tebengan, dan teman bertukar ilmu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, April 2021

AMANDA REGINA PUTRI
NIM.11720725079

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	14
B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau	16
C. Sejarah Kecamatan Mandau	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pemerintahan Daerah (Pemda)	23
1. Pengertian Pemda (Pemerintahan Daerah).....	23
2. Asas- Asas Pemerintahan Daerah (Pemda).....	24
3. Macam- Macam Pemerintah Daerah.....	26
B. Teori Efektifitas.....	30
1. Pengertian Efektifitas	30
2. Aspek-Aspek Efektivitas.....	31
C. Teori Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat).....	32
1. Pengertian Penanggulangan	32
2. Pengertian Penyakit Masyarakat	34
3. Macam- Macam Penyakit Masyarakat.....	36
4. Bentuk- Bentuk Pencegahan Penyakit Masyarakat.....	42
5. Metode Penanggulangan Penyakit Masyarakat	
(Gelandangan, Pengemis Dan Preman Palak).....	43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

D. Teori Ketertiban Umum	43
1. Pengertian Ketertiban Umum	43

HASIL PENELITIAN

A. Efektifitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum	46
B. Kendala serta Faktor Penghambat Pemerintah Kecamatan Mandau dalam menertibkan Preman, Gelandangan Dan Pengemis agar terlaksana nya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016	53

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table I.1	Populasi dan Sampel	10
Tabel II.1	Jumlah ASN berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	15
Tabel II.2	Kelurahan/Desa Kecamatan Mandau	17
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	19
Tabel II.4	Sarana Dan Prasarana	20
Tabel 4.1a	Angket 1	51
Tabel 4.2a	Angket 2	51
Tabel 4.3a	Angket 3	51
Tabel 4.4a	Angket 4	52
Tabel 4.1b	Angket 5	58
Tabel 4.2b	Angket 6	58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana Hukum lahir untuk mengatur dan menyasikan kepentingan didalam masyarakat, Hukum dilahirkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur dan terlaksana lingkungan hidup yang baik. Negara indonesia memiliki puluhan Provinsi yang menurut penulis hukum adalah sebuah norma atau peraturan, yang setiap peraturan daerah nya berbeda beda. Hukum Diindonesia didirikan oleh kemauan bangsa nya sendiri demi kenyamanan negara nya. Disini saya membahas tentang hukum tata negara yang dimana hukum tata negara ini adalah salah satu bagian cabang dari Ilmu Hukum yang konteksnya berhubungan dengan Peraturan Peraturan Negara agar terlaksana nya negara yang aman, adil dan damai.¹ Hukum tata negara adalah hukum yang berisi sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara itu sendiri.²

Diera Globalisasi seperti sekarang ini terdapat peningkatan jumlah pengangguran, Dinegara indonesia khususnya didaerah Riau terdapat banyak pengangguran yang diakibatkan oleh sulitnya menemukan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada 3 macam jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang

¹ Sakti Ramdhon Syah R, *Dasar Dasar Hukum Tata Negara* (Cv sosial Politik Genius, 2019) h. 8

² Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta, Kencana,2019) h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan mereka yang kedua setengah menganggur disini maksudnya orang yang bekerja tetapi tidak selalu bekerja hanya bila ada lapangan pekerjaan seperti buruh, yang ketiga pengangguran terselubung hal ini dikarenakan adanya lapangan pekerjaan tetapi seseorang tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena itu meningkat drastislah pengangguran.³ Sehingga berdampak pada perekonomian rakyat yang semakin hari semakin merosot yang menyebabkan banyak nya rakyat yang kelaparan karena sulitnya memenuhi kebutuhan hidup hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki keluarga, mereka harus berfikir keras bagaimana cara nya bisa melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Keterbatasan berfikir membuat mereka putus asa dan akhirnya memilih pekerjaan yang seharusnya tidak perlu mereka kerjakan, seperti Mengemis, Memalak Atau mengamen. Bahkan banyak dari mereka juga memilih jadi gelandangan mulai dari tidur digedung kosong, diemperan toko bahkan ada yang membangun rumah dari kardus karena ketidak mampuannya membayar sewa rumah Hal ini disebabkan oleh hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup yang tidak ada kepastian atau tujuan.

Negara Hukum merupakan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, negara hukum menjaga ketertiban supaya semuanya berjalan menurut hukum.⁴ Pada peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum tepatnya pasal 38

³ Drs, Alam S., MM. *Ekonomi* (Erlangga 2007) H. 9

⁴ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang : Bayumedia Publishing, 2005),h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyatakan bahwa setiap orang/badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri maupun bersama sama di jalan, dipasar kendaraan umum, dilingkungan pemukiman warga rumah sakit, sekolah, supermarket maupun mall kecuali mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Dan juga setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan gelandangan yang beroperasi di kawasan jalan raya dan fasilitas lainnya. Namun pada faktanya walaupun sudah ada perda yang mengatur tampaknya masih banyak preman, gelandangan yang berkeliaran di kecamatan mandau kabupaten bengkalis dikarenakan belum berjalannya Penanggulangan atau upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif, hal ini yang harus ditekankan di kecamatan Mandau dikarenakan masyarakatnya yang kurang peduli terhadap lingkungannya.

Adapun gambaran yang terjadi terhadap preman, gelandangan dan pengemis ini adalah:

1. Masalah kemiskinan

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masalah pendidikan

Pada umumnya pendidikan pengemis, gelandangan serta preman ini relatif rendah sehingga menjadi kendala besar untuk memperoleh kerja yang layak

3. Masalah keterampilan kerja

Pada umumnya mereka tidak memiliki keterampilan seperti tuntutan pasar kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis terdapat dalam pasal 1 yang berisikan :

- a. Ayat (1) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum.
- b. Ayat (2) Pengemis adalah orang-orang yang dapat penghasilan dari hasil meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- c. Ayat (3) Usaha Preventif adalah cara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan dan pengemis sehingga akan tercegah terjadinya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya.
- 2) Meluasnya pengaruh dan akibat adanya penggelandangan didalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya
- 3) Penggelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah di rehabilitir dan telah ditransmigrasikan kedaerah permukiman baru atau pun telah dikembalikan kedalam masyarakat.
 - a. Usaha represif adalah usaha usaha yang terorganisir baik melalui lembaga maupun bukan maksud menghilangkan gelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya didalam masyarakat
 - b. Usaha rehabilitir adalah usaha usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan⁵

Dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang berada dikecamatan mandau dan tempat tempat umum sudah menimbulkan banyak sekali masalah, diantaranya :

1. Masalah lingkungan atau tata Ruang kota.

Gelandangan pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal sehingga mereka tidur disepanjang pertokoan, jembatan, taman kota dan menyebabkan lingkungan kota yang menjadi kotor.

⁵ Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 tentang Gelandangan Dan Pengemis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masalah ketertiban sosial

Dengan adanya Preman, Gelandangan serta pengemis ini menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi terganggu karna masyarakat selalu merasa keamanan nya tidak terjamin.

3. Masalah kriminallitas

Faktor penyebab dari kriminallitas ini di lakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian kekerasan hingga samapi pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi. Mereka melakukan itu karna mereka harus memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dikecamatan mandau sudah banyak kejadian yang disebabkan oleh Preman Palak dan sangat meresahkan masyarakat mandau mulai dari mereka menodong anak sekolah seperti meminta hp duit bahkan motor anak anak tersebut bahkan jika anak tersebut tidak memberikan apa yang mereka minta, mereka nekat menganiaya anak itu. Fenomena tindakan premanisme sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh preman akan tetapi juga dilakukan oleh gelandangan⁶. Sehingga dari kejadian ini pemerintah kecamatan mandau mengajak masyarakat bersama sama menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing masing agar keluarga nya bisa terhindar dari kejahatan premanisme. Dan bukan hanya premanisme yang membuat masyarakat resah akan tetapi keberadaan Gelandangan dan pengemis juga karna kebanyakan dari gelandangan merupakan pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, mereka berpasangan

⁶ <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun tidak pernah menikah sehingga mengotori lingkungan dan rata rata dari mereka tidak mempunyai identitas diri yang jelas (KTP). Sedangkan Pengemis mereka selalu mengatas namakan Panti asuhan dan mesjid saat mereka mengemis dan kebanyakan dari mereka memaksa agar masyarakat memberikan uang yang padahal uang dari hasil sumbangan itu mereka gunakan untuk keperluan mereka sendiri.

Penulis tertarik mengambil lokasi penelitian dikecamatan mandau karna tingkat kejahatan Premanisme, jumlah Gelandangan Serta Pengemis disini lebih banyak dari pada kecamatan lain seperti kecamatan pinggir, kecamatan bukit batu dan kecamatan lain yang berada dalam kawasan kabupaten bengkalis, hal ini membuat penulis bertanya tanya apa faktor penyebab tingginya tingkat kejahatan premanisme, jumlah gelandangan serta pengemis dikecamatan mandau ini kenapa lebih banyak dari pada kecamatan lain, sebab itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan mengangkat judul “Efektifitas penanggulangan Preman, Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Dikecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016”

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi Penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu kecamatan yang ada di kabupaten bengkalis yaitu “Efektivitas penanggulangan Preman palak, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dikecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Dapat ditarik beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Penanggulangan Preman Palak, Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 ?
2. Apa Kendala Dan Faktor Penghambat Pemerintah kecamatan mandau dalam menertibkan Preman, Gelandangan Dan Pengemis agar terlaksana nya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Permasalahan yang telah di Rumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut⁷ :

- a. Untuk mengetahui Efektifitas penanggulangan Preman Palak, Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial agar Terlaksana nya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum lebih tepatnya Pasal 38.
- b. Untuk mengetahui kendala dan faktor penghambat Pemerintah Kecamatan Mandau dalam menanggulangi Preman Palak, Gelandangan dan Pengemis

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Peraturan daerah kabupaten bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum mengenai Efektifitas penanggulangan Preman Palak, Gelandangan Dan pengemis oleh Dinas sosial kabupaten bengkalis.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Efektifitas Penanggulangan Preman Palak, gelandangan dan pengemis yang berada dikecamatan mandau kabupaten bengkalis.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana bagi penulis
- 3) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Sosiologis Empiris dimana penelitian ini berupa studi-studi empiris yang tujuannya untuk menemukan teori teori mengenai proses terjadinya suatu kejadian.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan adalah Dinas Sosial dan lebih tepatnya Dikecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penulis memilih melakukan penelitian dilokasi ini karna mudah dijangkau oleh penulis dan substansi nya belum pernah diteliti sebelumnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁸ Dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan ciri yang sama.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.⁹

Adapun Populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut

Table I.1
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Dinas Sosial	10 Orang	5 Orang	50%
2.	Ketua Keamanan	2 Orang	1 Orang	50%
3.	Ketua Satpol PP	1 Orang	1 Orang	100%
4	Gelandangan	6 Orang	2 Orang	33%
5.	Pengemis	4 Orang	1 Orang	25%
6.	Preman	5 Orang	1 Orang	20%
JUMLAH		28 Orang	11 Orang	40%

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011),

⁹ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Cv Budi utama, 2019) h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Skunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet, buku buku hukum dan koran.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan narasumber yang diwawancarai. Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Ketua Satpol PP, Ketua Keamanan, Gelandangan, Pengemis Dan Preman Palak.

c. Kuesioner/Angket

Peneliti meminta Dinas terkait mengisi angket yang telah diberikan saat melakukan observasi dengan narasumber tujuannya agar data yang dicantumkan penulis lebih akurat.

d. Studi Kepustakaan

yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, Jurnal dan sumber lain seperti internet untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

e. Dokumentasi

Sejumlah data yang dikumpulkan ketika turun lapangan dan mengumpulkan data yang ada pada masalah penelitian

6. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan

angket dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang peneliti teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretariat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun Tugas, Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

1. Tugas Dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jalan Antara Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan administrasi dinas sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis didukung oleh sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Adapun jumlah ASN berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

Tabel II.1
Jumlah ASN berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Penjabat Pimpinan	1	Kepala Dinas
2.	Penjabat Administrastor	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3.	Penjabat Pengawas	19	Kasi, Kasubag dan Kepala UPTD
4.	Pegawai ASN Golongan IV	1	Staf
5.	Pegawai ASN Golongan III	6	Staf
6.	Pegawai ASN Golongan II	29	Staf
7.	Pegawai Honorer	79	Tenaga Administrasi, Kebersihan, Supir Dan Keamanan
	Jumlah	140	

B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau merupakan ibukotanya Duri adalah salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan berada di Pulau Sumatra, yang memiliki batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Dan Kota Dumai
2. Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan Pinggir
3. Sebelah Barat Berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu

Sedangkan wilayah nya adalah :

1. 0°56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara
2. 100°56'10 Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur

Kecamatan Mandau merupakan kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang paling besar ketiga berdasarkan luas wilayahnya, setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, yang mencapai 937,47 km². Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Desa Bumbung yang mencapai luas 104 km² atau sebesar 11,09 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

C. Sejarah Kecamatan Mandau

1. Terbentuknya Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang) Pada tahun 1977 Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri.

Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli(tertua). terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km. terdiri dari 15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan September 2011. adapun potensi daerah : pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kepala sawit), peternakan (Sapi, Kambing, Unggas), Perikanan darat dan industri makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata (sekolah gajah).

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain :

Tabel II.2
Kelurahan/Desa Kecamatan Mandau

NO	KELURAHAN/DESA	RW	RT
1.	Air jamban	23	122
2.	Babbusallam	8	55
3.	Balik Alam	10	35
4.	Batang Serosa	5	17
5.	Duri Barat	12	59
6.	Duri Timur	6	29
7.	Gajah Sakti	11	51
8.	Pematang Pudi	17	83
9.	Talang Mandi	15	68
10.	Bathin Betuah	4	18
11	Harapan Baru	5	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel diatas adalah daftar kelurahan/desa yang ada di kecamatan Mandau. Kecamatan Mandau terdiri dari 557 Rukun tetangga (RT) dan 116 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 122 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT

2. Kependudukan Dan Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Mandau

Berdasarkan data pada tahun 2020 Jumlah Penduduk dikecamatan Mandau kurang lebih sebanyak 400.000 Jiwa, yang mana terdapat 43.24 Kepala keluarga, Kecilnya cakupan Wilayah Kecamatan Mandau ini membuat Kepadatan pada kecamatan ini karna setiap satu kilometer persegi diisi oleh ratusan Orang.

Penduduk dikecamatan Mandau pada umumnya berkehidupan dari hasil perkebunan, pertanian dan berdagang adalah mata pencarian penduduk kecamatan Mandau, sebagian penduduk juga bermata pencarian melalui ternak ikan kolam karna pada dasarnya kecamatan Mandau adalah daratan yang jauh dari hasil laut.

Dibidang perdagangan kecamatan Mandau memiliki banyak supermarket dan mini market dikarna kan indomaret dan alfamart sudah tersebar diseluruh kecamatan Mandau Di tahun 2020 sudah tercatat 7 Indomaret dan 9 Alfamart. Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 291, warung / kedai makan minum sebanyak 2431 buah, 4 buah penginapan (losmen/ wisma/ motel) dan 6 hotel melati/ berbintang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	11,761
2.	Nelayan	34
3.	Peternak	27
4.	Konstruksi	52
5.	Industri	27
6.	Perdagangann	497
7.	Transportasi	82
8.	Dokter	212
9.	Bidan	383
10.	Perawat	286
11.	PNS	2.145
12.	ABRI Dan Polri	279
13.	Tentara	60
14.	Pencari Kerja	1238

Berdasarkan Tabel Diatas Penduduk dikecamatan Mandau pada umumnya banyak berprofesi sebagai Petani Dan Pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Terdapat 1.238 Orang Pencari Kerja/Pengangguran.¹⁰

3. Sarana Dan Prasarana

Kecamatan Mandau memiliki sarana dan prasarana lengkap yang dapat mendukung pemekaran di kecamatan Mandau. Mulai dari sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, hingga perhubungan. Di Jalan Sudirman terdapat pasar simpang padang yang bersambung dengan pasar sartika. Di jalan ini juga berdiri sebuah pusat perbelajaan menengah yang sudah aktif sejak tahun 2008 dan Mandau City. Selain itu terdapat kantor pos dan kantor kecamatan yang dilengkapi dengan gedung

¹⁰ Monografi Kecamatan Mandau Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan Bathin Batuah, puskesmas, restoran, dan beberapa toko buku. Jalan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi kota Duri. Menjelang kantor camat, juga ada sebuah tempat pengisian bahan bakar umum. Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal tahun 2000 dengan berdirinya secara hampir bersamaan ratusan rumah toko. Jalan ini juga telah diperlebar menjadi 4 jalur dengan pembatas jalan di tengahnya dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Bank, kantor Telkom, PLN, rumah sakit, dan masjid raya berada di jalan ini. Dua hotel berbintang dua terdapat di jalan ini.

Tabel II.4
Sarana dan Prasarana

NO	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Sekolah Negeri/Swasta, Sd,Smp,Sma SLB	199
2.	Rumah sakit	6
3.	Masjid	222
4.	Hotel	3
5.	SPBU	2
6.	Bank	12
7.	Sarana Olahraga	17
8.	Gereja	99

Sumber : *Monografi Kec Mandau 2020*

Kecamatan Mandau memiliki 199 Sekolah, diantaranya 47 Taman Kanak Kanak, 66 sekolah Dasar , 5 buah madrasah ibidiyah, 13 Sekolah Dasar Umum Dan 1 sekolah dasar swasta islam, 2 buah Sekolah Luar Biasa, 19 Sekolah Tingkat Pertama (SMP) Negeri, 11 Sekolah Menengah Pertama Swasta, 13 Madrasah sanawiyah, 8 Buah Sekolah Menengah Atas Negeri, 5 SMA swasta umum, 1 SMK Negeri, 1 Perguruan Tinggi Negeri, Kecamatan Mandau Juga memiliki 6 Rumah sakit besar Diantaranya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RSUD Mandau, Rumah sakit mutia sari, Rumah sakit permata hati, Rumah sakit Tursina Duri, Rumah sakit AAD dan terakhir Rumah sakit chevron. Dan juga memiliki 222 Mesjid yang terletak diseluruh kecamatan Mandau, Penginapan dikecamatan Mandau sampai 2020 tercatat sebanyak 3 Hotel Berbintang Dan 4 Penginapan Biasa , Mandau juga memiliki 2 SPBU yang terletak di Jl. Hangtuh Dan Jl. Sudirman Duri, Kecamatan Mandau juga memiliki Gereja sebanyak 99 Gereja dan Memiliki BANK sebanyak 12 Bank, yaitu Bank BRI, BNI, BRI syariah, BNI Syariah, Mandiri, BCA, Cimb Niaga, Danamon, BANK Mega, Mandiri Syariah, Bank Riau Kepri Dan BTN

4. VISI MISI Kecamatan Mandau

Adapun visi dan misi, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah:

Visi: Mewujudkan Kantor Camat Mandau Sebagai Pemerintahan yang berwibawa Transparan Dan Bertanggung Jawab

Visi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis mengandung makna sebagai berikut :

Pemerintahan yang Berwibawa Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan dan karyawan berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan yang beribawa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat bagi segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintahan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang Transparan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung dan mudah dipahami. Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi

Missi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.

Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good Government). Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.

Motto: Melayani dengan hati maklumat: dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pemerintahan Daerah (Pemda)

1. Pengertian Pemda (Pemerintahan Daerah)

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut, Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹. Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Negara.¹²

Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban

¹¹ (Undang-Undang No.32 Tahun 2004)

¹² <http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang

2. Asas- Asas Pemerintahan Daerah (Pemda)

Dalam Pemerintahan selalu memiliki asas, termasuk Pemerintahan Daerah. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Pemerintahan Daerah memiliki asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Inu Kencana Safei, menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti idiologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan¹³

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas¹⁴ :

¹³ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h.

¹⁴ Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Macam- Macam Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dalam Melaksanakan Tugasnya Pemerintah Daerah Dibantu oleh Perangkat Pemerintah Daerah salah satunya adalah Satpol PP dan Dinas Sosial Pada Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1) Sejarah Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagain perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kemanan masyarakat.¹⁵

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 Moto Praja Wibawa, muntuk mewedahi sebagai ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidal stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 maret 1950. Inilah awal terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para Petinggi/Militer Angkatan perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekosentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan perlindungan masyarakat .¹⁶

¹⁶[http://;Sejarah Satpol PP](http://;Sejarah%20Satpol%20PP). Diakses 18 maret 2021 pukul 17:07

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Fungsi Dan Tugas Satpol PP

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah “Perangkat” daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan perda dan peyelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah “ (pasal 148 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

b. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial memiliki Beberapa Fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Teori Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi¹⁷. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka

¹⁷Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 129.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan¹⁸. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaransasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Jadi Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

2. Aspek-Aspek Efektivitas

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan, mengacu pada pengertian efektivitas diatas berikut ialah beberapa aspek tersebut

1) Aspek Peraturan/Ketentua

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

¹⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, h. 86.

2) Aspek Fungsi/Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.

3) Aspek Rencana/Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai

4) Aspek Tujuan/Kondisi Ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan ialah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.

C. Teori Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi¹⁹ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,

¹⁹ Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id> diakses tanggal 20-02-2021 pukul 00:22 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif²⁰ Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan dalam hal kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan membentuk hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

²⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

2. Pengertian Penyakit Masyarakat

a. Pengertian Penyakit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup; atau kebiasaan yang buruk; sesuatu yang mendatangkan keburukan. Oleh Yuniawan penyakit dipandang sebagai suatu fenomena kompleks yang berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia, Penyakit dalam pandangan sosial sebenarnya berawal dari adanya perilaku sakit. Perilaku sakit yang dimaksud adalah adanya berbagai penyimpangan normatif-agamis yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia dianggap sebagai pribadi yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu perilaku dan cara hidup manusia dapat merupakan penyebab bermacam-macam penyakit baik di zaman primitif maupun di masyarakat yang sudah sangat maju peradaban dan kebudayaannya.

b. Pengertian Masyarakat

Menurut Selo Sumardjan berpendapat masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Sedangkan Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut²¹.

c. Pengertian Penyakit Masyarakat

Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrma kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada. Dari pengertian penyakit dan masyarakat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyakit masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan hukum yang berlaku.²²

²¹ [http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-criteria-masyarakat dalam kehidupan-sosial-antar-manusia](http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-criteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia)

²² http://hshasibuanbotung.blogspot.com/2009/06/penyakit-masyarakat-sebagai.html#_ftn6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Macam- Macam Penyakit Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebiasaan hidup yang beraneka ragam macamnya, dari kebiasaan hidup ini tidak semuanya baik untuk dijalani dalam kehidupan bermasyarakat, Bahkan ada gaya hidup masyarakat yang tidak sehat ini yang sulit dibrantas, Karena itu ada beberapa Penyakit masyarakat yang sedang marak-maraknya terjadi, Diantaranya :

a. Gelandangan Dan Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan “gepeng”, masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media masa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar khususnya di Kota Kudus. Gelandangan adalah sejumlah orang yang bersama-sama mempunyai tempat tinggal yang relatif tidak tetap dan mata pencaharian yang relatif tidak tetap serta dianggap rendah dan hina oleh orang-orang diluar masyarakat kecil itu yang merupakan suatu masyarakat yang lebih luas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya serta norma-norma yang ada pada masyarakat gelandangan tersebut dianggap tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh golongan-golongan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas yang mencakup masyarakat kecil itu. Kosa kata lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah Tunawisma.²³ Selanjutnya, pengertian gelandangan adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang. Adapun yang dimaksud dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain²⁴.

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit masyarakat (patologi sosial). Terkadang mereka juga harus mempertaruhkan nyawa ketika menggelandang dan mengemis di jalanan yang ramai bahkan yang paling berat adalah menghilangkan rasa malu atau menjatuhkan harga diri sendiri dengan menggelandang dan mengemis karena kegiatan tersebut selama ini dianggap masyarakat sebagai kegiatan yang memalukan dan tidak memiliki harga diri yang melakukannya²⁵. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit²⁶.

²³Magfud Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010, h. 2.

²⁴Tangdilintin, Paulus, *Masalah-Masalah Sosial* (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis), Universitas Terbuka, Jakarta, 2000, hlm. 1-5.

²⁵Feni Sudilarsih, 2012, *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*, Penerbit Sabil, Jakarta, h. 9.

²⁶Imas Dwi Iriawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo diberikan tiga gambaran umum gelandangan:

- 1) Orang miskin yang dikucilkan oleh masyarakatnya
- 2) Orang yang menyingkirkan hidupnya dari orang lain atau masyarakat sekitar nya
- 3) Orang yang tidak punya tempat tinggal tetap dan selalu berpindah pindah tempat

Sedangkan Menurut Y. Argo Twikromo, Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya²⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang mana dalam ketentuan Pasal 6 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis patut mendapatkan rehabilitasi sosial dalam rangka kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Gelandangan Dan Pengemis memiliki beberapa Kriteria :

- a. Kriteria Pengemis

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

²⁷ Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain.
 - 2) Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
 - 3) Berada di tempat-tempat umum.
 - 4) Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
 - 5) Karakteristik Gelandangan
 - 6) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
 - 7) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
 - 8) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas.
 - 9) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
 - 10) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
 - 11) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas
- Menurut Soetjipto Wirosardjono mengatakan ciri-ciri dasar yang melekat pada kelompok masyarakat yang dikategorikan gelandangan adalah mempunyai lingkungan pergaulan, norma dan aturan tersendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda dengan lapisan masyarakat yang lainnya, tidak memiliki

12) tempat tinggal, pekerjaan dan pendapatan yang layak dan wajar menurut yang berlaku memiliki sub kultur khas yang mengikat masyarakat tersebut.

b. Premanisme

Premanisme adalah sebutan untuk merujuk kepada kegiatan kelompok orang yang mendapatkan penghasilan nya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain, Premanisme adalah salah satu orang yang mendapatkan Penghasilan Dari Tindakan Kriminal, Tindakan kriminal yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Tindakan kriminal yang sering kita temui itu seperti pencurian, perampokan, Pemerasan, korupsi, dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya, baik yang tercatat di kepolisian maupun yang tidak karena tidak dilaporkan oleh masyarakat tetapi nyata-nyata mengancam ketenteraman masyarakat.²⁸ Fenomena premanisme diindonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan biasanya melalui pemerasan atau pemaksaan. Preman sangat identic dengan dunia criminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman

²⁸ Dwi Narkowo-Bagong Suyanto, Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak lepas dari kedua hal tersebut. Target dari premanisme ini biasanya adalah anak-anak remaja, mereka melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan bahkan menodongkan pisau atau senjata berbahaya lainnya.

Pada undang-undang dasar Republik Indonesia sudah terdapat pasal yang mengatur tepatnya pasal 368 KUHP (1) Barang siapa dengan maksud untuk menggantungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam dengan pidana paling lama 9 tahun.

Contoh kasus yang sering terjadi yang diakibatkan oleh premanisme :

- 1) Preman yang memungut pungutan liar kerumah rumah warga, yang apabila ditolak akan berpengaruh kepada kenyamanan bahkan keselamatan warga sekitar.
- 2) Preman preman dipasar yang memungut pungutan liar dari lapak lapak pedagang kecil yang apabila tidak diberikan akan berpengaruh kepada keselamatan lapak pedagang tersebut
- 3) Preman yang berada di terminal terminal dan meminta para supir angkutan umum untuk memberikan setoran setiap melewati terminal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bentuk- Bentuk Pencegahan Penyakit Masyarakat

Pergaulan serta lingkungan yang tidak baik adalah salah satu factor munculnya Penyakit masyarakat yang mengakibatkan banyaknya terutama generasi muda yang terjerumus karena akibat coba-coba dan pada akhirnya melakukan tindakan yang negatif dan merusak mental serta perilakunya sehingga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat .Dalam menghadapi Masalah Penyakit Masyarakat yang sedang marak marak nya terjadi ada beberapa metode Penanggulangan yang bisa dilakukan, Diantaranya :

- a. Pemerintahan Daerah Wajib memberikan Penyuluhan Tentang Bahaya nya Penyakit masyarakat, Berupa Penyuluhan Tentang Lingkungan Hidup, Bahaya Narkoba, Bahaya Miras, Penyuluhan Tindak Kriminal dan lainnya yang berhubungan dengan Penyakit masyarakat guna untuk menjauhkan masyarakat dari perilaku yang menyimpang dan yang merusak norma serta aturan yang ada pada agama dan Negara
- b. Bagi Masyarakat agar lebih aktif pada lingkungan yang positif seperti menghadiri Penyuluhan Penyuluhan, Menghadiri Pengajian, Memilih Lingkungan yang baik Tujuannya agar terhindar dari Perilaku negative yang bisa menjerumuskan masyarakat itu sendiri.
- c. Bersama sama merangkul Masyarakat nya yang sudah terjerumus dalam Pekat
- d. Lebih banyak diadakan nya kegiatan keagamaan dilingkungan warga
- e. Saling Menghargai dalam anggota Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Gelandangan, Pengemis Dan Preman Palak)

Penanggulangan gelandangan dan pengemis merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah dan satpol PP, Dalam melaksanakan tugasnya satpol PP telah menangani kasus preman palak yang telah meresahkan warga sekitar dengan cara :

- a. Mengamankan mereka dan memberi effect jera agar mereka tidak meneruskan perbuatannya, namun apabila masi terus berlanjut maka akan diserahkan ke kepolisian karna sudah termasuk tindak criminal.
- b. Gelandangan dan pengemis sudah dilakukan beberapa bentuk penanggulangan seperti dibotakkan bagi yang laki laki dan dipulangkan kedaerah asal mereka masing-masing dikarnakan kebanyakan dari gelandangan dan pengemis ini bukan berasal dari kecamatan Mandau melainkan berasal dari daerah lain.
- c. Membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan nya

D. Teori Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum atau public policy memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendu a. Dalam praktik berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.²⁹

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.³⁰ Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56

³⁰ *Ibid* 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan.

Ketertiban Umum memiliki arti suatu keadaan agar pemerintah dan masyarakat berkegiatan secara aman, tertib dan teratur, dapat di simpulkan bahwa ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis yang berjalan teratur sesuai norma dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah untuk tujuan pembangunan yang di harapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Efektivitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis oleh Dinas sosial Kabupaten Bengkalis dikecamatan Mandau berdasarkan Peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum belum tersosialisasikan dengan baik, dan belum diterapkan sesuai dengan peraturan daerah yang telah berlaku. Sedangkan pada peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum tepatnya pasal 38 menyatakan bahwa setiap orang/badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri maupun bersama sama dijalan,dipasar kendaraan umum,dilingkungan pemukiman warga rumah sakit, sekolah, supermarket maupun mall kecuali mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Dan juga setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan gelandangan yang beroperasi dikawasan jalan raya dan fasilitas lainnya. Sedangkan yang terjadi di kecamatan Mandau malah makin banyak dan makin tinggi tingkat premanisme, gelandangan dan pengemisnya dari pada kecamatan lain di wilayah kabupaten bengkalis dikarna kan kecamatan Mandau merupakan jalan lintas yang biasa diakses ke beberapa provinsi lainnya . Satpol PP Kecamatan Mandau telah melakukan razia rutin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mingguan yang mana terkhusus mengamankan para gelandangan dan pengemis ini, sikap tegas yang dilakukan satpol PP kecamatan Mandau adalah dengan cara membotakkan rambut dari pengemis dan gelandangan ini setelah itu memulangkan nya kedaerah asal mereka masing-masing dikarna kan banyak dari mereka yang berasal dari luar daerah kecamatan Mandau, namun dikarna kan banyak nya dari mereka yang tidak memiliki identitas membuat satpol PP kecamatan Mandau mengalami kesulitan untuk memulangkan para pengemis serta gelandangan ini. Untuk tingkat premanisme Satpol PP Kecamatan Mandau sudah melakukan penertiban akan tetapi banyak dari mereka yang masi saja melakukan ulang hal serupa sehingga membuat satpol PP kecamatan Mandau harus menyerahkan nya kepihak yang berwenang yaitu Polisi .

2. Faktor Penghambat serta Kendala Dinas Sosial dalam Menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum adalah :
 - a. Belum terlaksana nya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 dengan Baik.
 - b. Kurang nya sosialisasi tentang Ketertiban umum kepada masyarakat
 - c. Satpol PP belum menerima laporan warga tentang Pungli walaupun kasusnya sudah umum terjadi
 - d. Dinas sosial kabupaten Bengkalis belum melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengemis Dikecamatan Mandau sehingga menyebabkan Para Gelandangan tidak memiliki effect jera.

- e. Kecamatan Mandau belum memiliki Rumah Pemulihan Bagi Para Gelandangan, Pengemis Dan Preman
- f. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan dikecamatan mandau sehingga menyebabkan banyak nya pengangguran
- g. Para Gelandangan Dan Pengemis tidak memiliki identitas asli.

B. Saran

Untuk mencapai Efektivitas Penanggulangan terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum, setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Perlunya Kesadaran Pemerintah dalam mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar berjalannya Peraturan – Peraturan Daerah secara optimal dan lebih memperketat Aturan yang ada agar efektif dalam menangani masalah masalah sosial yang ada dikecamatan Mandau
2. Aparat Pemerintahan harus lebih Perhatian Kepada Masyarakat Agar Terlaksana nya Peraturan-Peraturan Daerah Yang baik.
3. Perlu adanya Rumah Pemulihan Bagi Para Gelandangan Dan Pengemis Dikecamatan Mandau Dikarna kan kecamatan Mandau adalah jalan lintas maka terdapat banyak Gelandangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang : Bayumedia Publishing, 2005)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), h.122
- Drs, Alam S., MM. *Ekonomi* (Erlangga 2007)
- Dwi Narkowo-Bagong Suyanto, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta, Kencana,2019)
- Feni Sudilarsih, 2012, *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*, Penerbit Sabil, Jakarta
- Imas Dwi Iriawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56
- Magfud Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis* (Gepeng), Jurnal Peneliti STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015
- Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Monografi Kecamatan Mandau Tahun 2020
- Sakti Ramdhon Syah R, *Dasar Dasar Hukum Tata Negara* (Cv sosial Politik Genius, 2019) h. 8
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 136
- Tangdilintin, Paulus, *Masalah-Masalah Sosial* (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis), Universitas Terbuka, Jakarta, 2000, hlm. 1-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Cv Budi utama, 2019) h. 47

Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 6.

Undang-undang:

(Undang-Undang No.32 Tahun 2004)

Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>.diakses tanggal 20-02-2021 pukul 00:22 Wib.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum

Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 tentang Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018.

Intenet:

<http://Sejarah Satpol PP>. Diakses 18 maret 2021 pukul 17:07

http://hshasibuanbotung.blogspot.com/2009/06/penyakit-masyarakat-sebagai.html#_ftn6

<http://organisasi, Org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-criteria-masyarakat dalam kehidupan-sosial-antar-manusia>

<http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Satpol PP

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dikecamatan Mandau ?
2. Apakah Dikecamatan Mandau sudah tersosialisasikan dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tersebut ?
3. Apa saja Faktor Penghambat Satpol PP Dan Dinas Sosial Dalam menertibkan Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis dikecamatan Mandau ?
4. Apa saja upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan Para Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis ?

B. Pertanyaan Untuk Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis

1. Alasan Mengapa memilih Menjadi Gelandangan/Preman/Pengemis, Dan mengapa tidak mencoba mencari pekerjaan lain agar mendapatkan hidup yang lebih layak serta keluarga yang nyaman, apakah ada factor penghambat yang menyebabkan narasumber tidak bisa mendapatkan hidup yang baik ?
2. Selama dijalanan apakah Narasumber pernah terkena razia dan Bagaimana tindakan yang dilakukan Satpol PP, Apakah Narasumber mendapatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan dan pengawasan yang terbaik dari Dinas terkait sehingga mendorong Narasumber untuk menciptakan hidup yang baik ?

C. Pertanyaan Untuk Ketua Keamanan

1. Bagaimana cara bapak mengatasi jika Para Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis ini masuk kedalam lingkungan tempat tinggal bapak ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan agar lingkungan tempat tinggal bapak terhindar dari Gelandangan, Pengemis Dan Preman Palak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Satpol PP Kecamatan Mandau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Gelandangan Kecamatan Mandau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ketua Keamanan



Wawancara dengan Pengemis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Preman Palak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENANGGULANG PREMAN PALAK, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM” yang ditulis oleh :

Nama : **AMANDA REGINA PUTRI**
 NIM : 11720725079
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada

Hari/Tanggal : Kamis 09 Juni 2021
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Alpi Syahrin, SH.,MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui :
 Kasubag Akademik Kemahasiswaan Dan Alumni
 Fakultas Syariah Dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul : Efektivitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Ditulis oleh saudara :

Nama : Amanda Regina Putri
NIM : 11720725079
Program Studi : Hukum Tata Negara
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : 15 Oktober 2020
Narasumber : Muslim, S.Ag., SH.,M.Hum

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 12 Januari 2021
Narasumber

Muslim, S.Ag., SH.,M.Hum

NIP.19720505 201411 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Maret 2021

Un.04/F.I/PP.01.1/3089/2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Peri Pirmansyah, SH, MH

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : AMANDA REGINA PUTRI

NIM : 11720725079

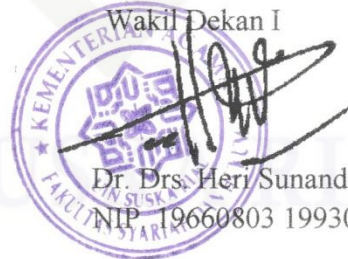
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TERHADAP PREMAN PALAK, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl

NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1668/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AMANDA REGINA PUTRI
NIM : 11720725079
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TERHADAP PREMAN PALAK, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38412
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/1668/2021 Tanggal 3 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | AMANDA REGINA PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720725079 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TERHADAP PREMAN PALAK, GELANDANGGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmpsp.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 10 Februari 2021

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten

Bengkalis

di -

Tempat

Nomor : 061/DPMPTSP-JU/II/2021/74

Lampiran :

Hal : Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 530/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38412 tanggal 04 Februari 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : AMANDA REGINA PUTRI
Alamat : Jl. Dharma Bakti No.52 RT.001 RW.005 Kel. Air Jamban
Kecamatan Mandau
NIM : 11720725079
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :

"Efektifitas Penanggulangan terhadap Preman Palak, Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum".

2. Lokasi Penelitian :

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

3. Penelitian ini berlangsung selama 3 Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 10 Februari 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP. M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750619 199503 1 003

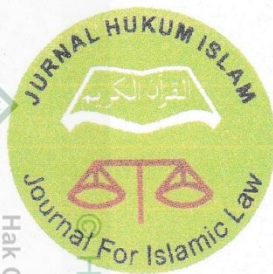
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
4. Yang Bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AMANDA REGINA PUTRI
NIM : 11720725079
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TERHADAP PREMAN PALAK, GELANDANGGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Pembimbing: Peri Pirmansyah, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Amanda Regina Putri, lahir di Duri pada tanggal 20 Desember 1998, merupakan anak ke satu dari 2 bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Yon Hendri dan Ibu Hilma Midesia. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 58 Air Jamban Duri, Kecamatan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau pada tahun 2011, lalu melanjutkan ke tingkat SMP N 8 Mandau, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau hingga tahun 2014. Pada tahun 2017 tamat dari SMA N 2 Mandau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dan ditahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada tahun 2019 penulis mengikuti Magang di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Dan pada tahun 2020 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. dan selanjutnya penulis menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum pada tahun 2021. Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penanggulangan Preman Palak, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.”